

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. (Rosita, 2020). Dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe”. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dikemukakan bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Topeng tersebut sudah dikatakan tepat waktu dan tetap sasaran jika dilihat dari indikator pencapaian tujuan. Dan kemudian indikator integrasi program tersebut telah disosialisasikan dalam musdes. Kemudian untuk indikator adaptasi lapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya dalam perencanaan program dan pelaksanaannya.
2. (Agustina, 2022) dengan judul “Efektivitas pelaksanaan program, pembangunan infrastruktur pedesaan (studi pada desa latawaro kecamatan lambai kabupaten kolaka utara “Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut bahwa efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan terdiri dari tiga indikator efektivitas yaitu, Indikator Pencapaian Tujuan dalam pelaksanaan program tersebut sudah terealisasi tepat waktu. Indikator Integritas tercapai dimana infrastruktur yang diadakan di Desa Latawaro terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kemudian musyawarah perencanaan dengan masyarakat desa.

Indikator Adaptasi dimana dalam perencanaannya sudah terstruktur dan pembangunannya sesuai dengan kondisi pedesaan di Desa Latawaro. Dalam hasil penelitian tersebut pembangunan di Desa Latawaro dapat dikatakan cukup efektif karena ketiga indikator tersebut telah tercapai dan sesuai, serta memberi dampak terhadap perekonomian desa.

3. (Tigraha, 2025). Dengan judul “Studi Evaluasi Terhadap Efektivitas Pembangunan Jalan Mauara Padang-Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin.” Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa Pembangunan Jalan Muara Padang-Muara Sugihan secara signifikan meningkatkan aksesibilitas wilayah. Dimana hal ini ditunjukkan oleh percepatan waktu tempuh, kemudahan mobilitas penduduk, serta peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama menuju fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan. Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jalan yang dibangun memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
4. (KARINA POLUAN, 2021) Dengan Judul “Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasan Selatan)”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu menunjukkan bahwa efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan melalui penggunaan dana desa di Desa Elusan Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasan Selatan telah

tercapai pada aspek pemahaman program, ketepatan sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan nyata, akan tetapi belum efektif dalam hal ketepatan waktu. Pemerintah desa selaku pelaksanaan belum mampu menyesuaikan waktu dengan memperhatikan potensi masyarakat dan kondisi alam/cuaca dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa.

5. (Asrid Chabelita Maluala, 2024)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti menyatakan bahwa berdasarkan wawancara dengans sejumlah tokoh masyarakat di Desa Sawai, terdapat pandangan beragam tentang ketepatan sasaran program pembangunan. Beberapa pihak merasa bahwa program tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran, terutama dalam hal distribusi dan pemanfaatan hasil pembangunan di wilayah mereka. Wawancara dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa sosialisasi program sering tidak berjalan efektif, sebagian besar masyarakat tidak merasa terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program yang direncanakan. Sementara itu, dalam aspek pencapaian tujuan program, penelitian menemukan bahwa meskipun terdapat beberapa dampak positif dari pembangunan desa, seperti perbaikan infrastruktur dasar, banyak masyarakat yang menilai hasilnya belum optimal.

B. Landasan Teori

1) Pengertian Administrasi

Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan bersama. Pengertian administrasi dalam bahasa Indonesia ada 2 (dua): Administrasi berasal dari bahasa Belanda “*Administratie*” yang merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya). Dan pengertian Administrasi secara luas, berasal dari bahasa Inggris “*Administration*”, yaitu proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (S.P Siagian, 1973)

Menurut The Liang Gie (1980) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Adapun menurut Sondang P. Siagian (1980) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) (Rahman, 2017) Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bidang studi dan praktik yang berfokus pada pengelolaan dan implementasi kebijakan publik oleh lembaga pemerintah dan

organisasi sektor publik. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk teori, prinsip, dan praktik yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif.

Menurut Harbani Pasolong (2010:8) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008: 4) mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*Manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan (Keban, 2008: 4) menyatakan bahwa istilah dari Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.

3) Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sukses, berhasil atau sesuatu yang dilakukan mencapai keberhasilan dalam tujuan yang

ditetapkan. (Mardiasmo, 2000) mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi atau program dinilai efektif apabila output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mahmudi (2005:92) Efektivitas merupakan hubungan antar *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan tersebut. Sehubungan dengan pendapatan tersebut bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antar output dengan tujuan. Dan semakin besar kontribusi output maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Menurut Richard et al. (2013), efektivitas dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu:

1. Efektivitas internal, yang berfokus pada efisiensi dan kepuasan karyawan.
2. Efektivitas eksternal, yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan adaptasi terhadap lingkungan.
3. Efektivitas keseluruhan, yang menggabungkan kedua aspek tersebut untuk memastikan keberlanjutan organisasi.

1) Indikator Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu program memang bukanlah suatu hal yang mudah, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda tergantung pada siapa yang menilai dan juga menafsirkannya. Tingkatan efektivitas juga dapat diukur dengan cara membuat perbandingan yang telah ditentukan oleh hasil yang telah dicapai. Namun, apabila suatu usaha atau hasil yang telah dilakukan tidaklah tepat, maka tidak tercapainya suatu tujuan dan sasaran yang telah diharapkan dan proses tersebut dapat dikatakan tidak efektif

Steers mengatakan bahwa “Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai”. Teori diatas diperkuat oleh Martini Huseini (1987) yang menyatakan bahwa: “Pendekatan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai ukuran efektivitas organisasi. Jika tujuan dinyatakan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh organisasi di masa datang, sasaran dapat digambarkan sebagai tujuan antara yang lebih bersifat operasional. Dalam pengertian tersebut, maka sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi yang dilihat dari baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, hal ini juga mencakup sasaran dari keseluruhan organisasi atau sasaran dari suatu bagian tertentu dari organisasi.

Menurut David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam Danim (2012:119-120) menyebutkan bahwa beberapa indikator efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) atau masukan (*input*) dengan keluaran (*output*), usaha dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk Kreatif Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Sedangkan, menurut Richard M. Steers (Steers, 1985) pada buku yang berjudul “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan bahwa ada 3 (tiga) indikator efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan dilapangan.

Berdasarkan beberapa indikator ukuran efektivitas yang dikemukakan diatas maka penelitian ini menggunakan teori ukuran efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Richard M. Streesr dalam Tangkilisan yaitu: pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi.

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Adapun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas yang mana hal ini bisa dilihat dari sisi internal dan eksternal. Menurut Nugroho (2017), mengemukakan bahwa faktor internal termasuk kejelasan tujuan

kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan kompetensi orang-orang yang menjalankannya.

Menurut Richard M. Steers (1995:9) dalam buku karya Khaerul Umam (2012:351) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu:

1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan

banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada didalam organisasi sehingga efektifitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, Serta adaptasi terhadap, perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan diteliti, yaitu penelitian ini ingin melihat sejauh mana efektivitas program pembangunan jalan usaha tani dalam meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat.

4) Pengertian Jalan Usaha Tani (JUT)

Menurut Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usaha Tani (Sastropoetra, 2018) Jalan Usaha Tani merupakan jalan yang diperuntukkan sebagai jalur utama prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berfungsi untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi serta pengangkutan hasil produksi pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengempulan sementara. Disisi lain menurut Siregar jalan usaha tani merupakan prasarana yang berfungsi sebagai akses jalan antara lahan pertanian dan pusat perdagangan dengan tujuan untuk memfasilitasi petani dalam melakukan penjualan serta konektivitas darat yang menghubungkan antara masing – masing kawasan pertanian.

Menurut Sutanto (2015) mengemukakan bahwa jalan usaha tani berfungsi sebagai penghubung antar lokasi produksi dan pusat distribusi, sehingga keberadaanya sangat menentukan efisiensi waktu dan biaya dalam proses produksi pertanian. Dengan adanya jalan usaha tani yang baik, petani dapat mengangkut hasil panen dengan lebih cepat dan mengurangi kerusakan hasil pertanian akibat sulitnya akses transportasi.

Menurut (Yunus, 2016) mengemukakan bahwa pembangunan jalan usaha tani juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pedesaan. Jalan tersebut tidak hanya meningkatkan aksesibilitas ke lahan pertanian, tetapi juga memperluas interaksi sosial antarwilayah dan membuka peluang

pengembangan ekonomi desa. Oleh sebab itu, pembangunan jalan usaha tani termasuk salah satu program strategis pembangunan infrastruktur pertanian.

Menurut (Saragih, 2018) menyatakan bahwa efektivitas jalan usaha tani tidak hanya dilihat dari aspek fisik seperti panjang atau lebarnya jalan, tetapi juga dari sejauh mana jalan tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Jalan usaha tani yang efektif harus mampu memberikan mamfaat ekonomi secara langsung bagi petani, seperti penurunan biaya transportasi dan peningkatan pendapatan.

Secara keseluruhan sesuai yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli di atas menyatakan bahwa jalan usaha tani merupakan infrastruktur vital dalam sistem pertanian berkelanjutan. Pembangunan dan pemeliharaannya perlu memperhatikan aspek teknis, sosial, dan ekonomi agar mamfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat tani. Dengan demikian , jalan usaha tani berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani pedesaan.

1) Fungsi Dan Tujuan Jalan Usaha Tani

Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Indonesia K. P., 2012) menyatakan bahwa jalan usaha tani berfungsi sebagai prasarana utama yang menghubungkan lahan pertanian dengan pemukiman, pasar, serta fasilitas produksi seperti gudang dan irigasi. Dengan adanya jalan

usaha tani yang memadai, mobilitas petani menjadi lebih lancar sehingga biaya produksi dan waktu tempuh dapat ditekan secara signifikan.

Secara umum, fungsi utama jalan usaha tani adalah mempermudah akses transportasi alat, sarana produksi pertanian, serta hasil panen dari dan menuju lahan pertanian. Tujuan pembangunan jalan usaha tani tidak hanya sebatas pada peningkatan aksesibilitas tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Menurut (Hermanto, 2016) mengemukakan bahwa tujuan utama pembangunan jalan usaha tani adalah untuk mendukung sistem pertanian, mempercepat distribusi hasil panen, dan mengurangi kehilangan hasil pasca panen akibat keterbatasan akses transportasi. Adapun sejalan dengan pendapat (Mardikanto, 2013) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk jalan usaha tani, yang merupakan bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka pembangunan pertanian yang inklusif.

2) Indikator Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) merupakan salah satu infrastruktur penting yang secara langsung berdampak pada sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa. Efektivitas program ini dapat diukur dari dua aspek utama, yaitu :

1. Peningkatan aksesibilitas. Efektivitas pembangunan jalan usaha tani (JUT) dalam aspek ini mencakup kemudahan dan kecepatan petani dalam beraktivitas, seperti:

- 1) Mempermudah Akses ke Lahan Pertanian
- 2) Meningkatkan Mobilitas Pertanian
- 3) Pengurangan Waktu dan Tenaga Kerja

2. Peningkatan Perekonomian Masyarakat. Efektivitas pembangunan jalan usaha tani dalam aspek ekonomi berhubungan langsung dengan biaya produksi, harga jual, dan pendapatan petani. Adapun sebagai berikut :

- 1) Penurunan Biaya Transportasi
- 2) Peningkatan Harga Jual dan Pendapatan Petani
- 3) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa Secara Keseluruhan.

5) Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi (Black, 1981).

Menurut Magribi (1999), Mengemukakan bahwa aksesibilitas adalah ukuran kemudahan yang meliputi waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dari sebuah sistem.

Menurut Bintarto (1989), Mengemukakan bahwa semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesibilitas yang didapat begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah tingkat aksesibilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lain.

1) Indikator dan Dimensi Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan konsep multidimensi yang esensial dalam konteks pembangunan inklusif, merujuk pada kemudahan yang diperoleh individu, khususnya kelompok rentan, untuk mencapai dan memanfaatkan suatu fasilitas, layanan, atau sumber daya tanpa hambatan diskriminatif.

Konsep ini umumnya dikaji melalui tiga dimensi utama yang saling terhubung, yaitu:

1. Fisik berfokus pada dimensi spasial dan lingkungan binaan, diukur melalui indikator seperti jarak tempuh (*proximity*), ketersediaan sarana transportasi publik yang memadai, dan desain universal

fasilitas (misalnya keberadaan ramp, lift, dan guiding block) yang menjamin kemudahan pergerakan dan penggunaan.

2. Aksesibilitas Sosial mencakup faktor non-fisik yang berkaitan dengan penerimaan, informasi, dan pelayanan, diukur melalui indikator seperti penerimaan sosial (tidak adanya stigma atau diskriminasi), akses informasi yang formatnya beragam (Braille, audio), serta kualitas dan responsivitas pelayanan dari petugas.
3. Aksesibilitas Ekonomi menitikberatkan pada kemampuan finansial pengguna, diukur melalui indikator keterjangkauan biaya (biaya layanan atau transportasi relatif terhadap pendapatan), dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang menunjang aksesibilitas.

Dengan demikian, suatu fasilitas dikatakan benar-benar aksesibel apabila memenuhi kriteria tinggi di ketiga dimensi tersebut, karena hambatan pada salah satu dimensi (misalnya, bangunan fisik yang baik tetapi tarifnya sangat mahal) akan secara signifikan membatasi peluang partisipasi yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

6) Pengaruh Infrastruktur Terhadap Aksesibilitas Masyarakat

Pengaruh infrastruktur terhadap aksesibilitas masyarakat sangatlah fundamental dan bersifat langsung. Infrastruktur, dalam konteks ini, merujuk pada jaringan fisik dan sistem dasar (seperti transportasi, telekomunikasi, energi, dan air

bersih) yang menopang kegiatan ekonomi dan sosial. Ketersediaan, kualitas, dan konektivitas infrastruktur menentukan seberapa mudah masyarakat dapat mencapai layanan, sumber daya, dan peluang yang mereka butuhkan.

Menurut (Litman, 2013) mengemukakan bahwa tingkat aksesibilitas suatu wilayah ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu tersedianya infrastruktur fisik dan mutu sistem transportasi yang mendukungnya. Infrastruktur yang memadai memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjangkau berbagai pusat aktivitas dengan lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Adapun pendapat yang sejalan dengan yang telah diungkapkan diatas, menurut (Puspasari, 2016) menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat, karena hal tersebut mampu memperkuat daya saing ekonomi lokal serta mendorong peningkatan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan.

Menurut (Kodoatie, 2011) menyatakan bahwa pengaruh infrastruktur terhadap aksesibilitas tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial. Peningkatan jaringan transportasi dinilai dapat memperluas jangkauan interaksi antarwilayah, mempercepat penyebaran informasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur dapat dipahami bukan semata-mata sebagai fasilitas fisik penunjang mobilitas, melainkan juga sebagai sarana strategis dalam

memberdayakan masyarakat dan memperkuat hubungan sosial-ekonomi antar wilayah.

7) Pengertian Ekonomi Desa

Ekonomi desa dapat dipahami sebagai sistem kegiatan ekonomi yang tumbuh secara alami di wilayah pedesaan, dengan ciri khas yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta potensi sumber daya alam setempat. Aktivitas ekonomi di desa tidak semata-mata berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, melainkan juga mencakup dimensi sosial dan keberlanjutan lingkungan. Sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2015), pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dalam hal peningkatan pendapatan, ketersediaan lapangan kerja, serta kualitas hidup penduduk desa. Oleh karena itu, ekonomi desa menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.

Menurut Suharto (2014) mengemukakan bahwa ekonomi desa mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di pedesaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang bersumber dari sektor pertanian maupun dari sektor non-pertanian. Umumnya, aktivitas ekonomi di pedesaan didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, dan sektor informal yang berperan besar dalam menopang struktur ekonomi lokal. Maka

dari itu, upaya memperkuat ekonomi desa berarti memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta pengelolaan potensi lokal secara optimal.

1. Karakteristik Ekonomi Pedesaan (Sektor Pertanian, UMKM, dan Tenaga Kerja Lokal)

Ekonomi desa dapat dipahami sebagai sistem kegiatan ekonomi yang tumbuh secara alami di wilayah pedesaan, dengan ciri khas yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta potensi sumber daya alam setempat. Aktivitas ekonomi di desa tidak semata-mata berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, melainkan juga mencakup dimensi sosial dan keberlanjutan lingkungan

Ekonomi pedesaan memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur ekonomi nasional karena secara langsung berhubungan dengan kesejahteraan sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa karakteristik utama ekonomi pedesaan ditandai oleh ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian, keterbatasan akses terhadap sumber permodalan, serta rendahnya tingkat diversifikasi ekonomi. Ciri-ciri tersebut menyebabkan perekonomian pedesaan menjadi lebih rentan terhadap berbagai dinamika eksternal, seperti perubahan iklim,

fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.

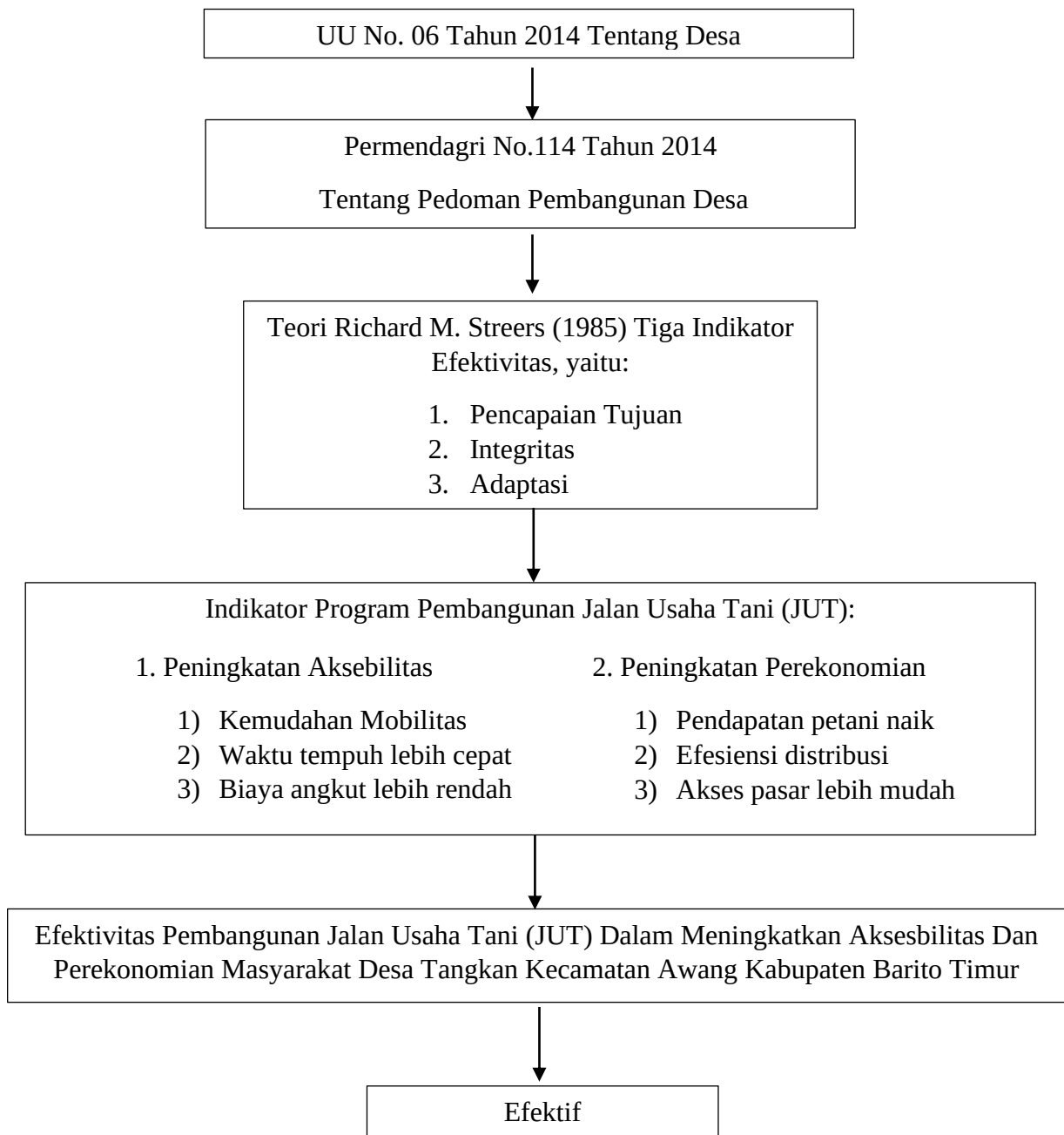
Sektor pertanian hingga kini masih menjadi pilar utama perekonomian desa, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ellis (2000) mengemukakan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah pedesaan menggantungkan sumber penghasilannya dari kegiatan pertanian, baik melalui budidaya tanaman pangan, hortikultura, maupun peternakan. Namun, tingkat produktivitas sektor ini masih relatif rendah akibat keterbatasan modal, minimnya penerapan teknologi modern, serta akses pasar yang belum optimal. Dalam konteks pembangunan pedesaan modern, upaya peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas utama melalui inovasi teknologi, penguatan sistem penyuluhan pertanian, serta perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi (Chambers & Conway, 2012).

Selain sektor pertanian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga berkontribusi besar terhadap dinamika ekonomi pedesaan. Keberadaan UMKM memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi non-pertanian seperti industri rumah tangga, perdagangan, dan jasa. Menurut Tambunan (2019), UMKM di wilayah pedesaan memiliki peran strategis dalam

memperluas lapangan kerja, menurunkan angka pengangguran, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. Akan tetapi, sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal usaha, rendahnya kemampuan manajerial, dan akses pasar yang terbatas, terutama terhadap lembaga keuangan formal. Sementara itu, karakteristik tenaga kerja lokal di pedesaan cenderung didominasi oleh individu dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah. Kondisi tersebut berimplikasi pada produktivitas kerja dan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Sujarwo (2018) menyebutkan bahwa mayoritas tenaga kerja pedesaan bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Situasi ini mendorong terjadinya mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Namun, apabila migrasi ini tidak diimbangi dengan penguatan basis ekonomi lokal, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dan berpotensi memperlemah struktur sosial-ekonomi pedesaan.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber : Dibuat Peneliti 2026